

# Dampak Keterlibatan Pesantren dalam Politik: Studi Kasus Pesantren di Yogyakarta

**Saidin Ernas**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon

**Ferry Muhammadsyah Siregar**

Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS)  
Yogyakarta

**Abstract:** Nowadays, many Islamic boarding schools (*pesantren*) start to involve in practical politics, turn out from their function as Islamic education institutions. In fact, there are socio and political impacts must be considered logically. This article based on the research result in an Islamic boarding school in Yogyakarta. Using relevant theoretical frame, observation method, and depth interview, this article tries to describe findings of political involvement in politics. Though this kind of practice give economics material income, in the same time, decrease Islamic boarding schools legitimacy and impacts to community resistance toward Islamic boarding school point of view.

**Keywords:** Pondok Pesantren Al-Munawwir, kiai, politik, dampak.

## A. Pendahuluan

Pesantren adalah sebuah dunia yang menarik dikaji dan diteliti. Meskipun selama ini banyak peneliti menjadikan pesantren sebagai objek kajian, selalu saja tersedia perspektif tertentu yang belum bisa

diungkap.<sup>1</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki kekayaan khazanah pengetahuan sosial yang dapat diteliti dari berbagai aspek keilmuan. Posisi pesantren yang demikian menjadi bukti bahwa pesantren bukan hanya lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia dan masih tetap eksis hingga kini, tetapi juga merupakan entitas sosial yang memiliki pengaruh cukup kuat sekaligus unik dalam sistem politik di Indonesia.

Hal tersebut dapat dilihat dari perhatian yang diberikan kekuatan-kekuatan politik: partai politik atau para politisi yang selalu melakukan kunjungan politik ke pesantren-pesantren yang berpengaruh di berbagai daerah untuk menggalang dukungan politik. Sejak era Reformasi yang ditandai demokratisasi dan keterbukaan sistem politik, sikap politik kaum santri dirasakan semakin menonjol. Abdurrahman Wahid yang juga seorang santri, berhasil menjadi presiden kelima RI. Komunitas pesantren dan para kiai yang memimpin pesantren mengalami euforia politik, sehingga ramai-ramai terlibat dalam politik praktis.

Sejauh ini perdebatan tentang keterlibatan pesantren dalam politik selalu berada dalam tarik-menarik dua pendapat yang saling bertolak belakang. Tarik-menarik tersebut antara pendapat yang mengabsahkan serta menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar dan pendapat yang mengkritiknya dengan keras sebagai pengingkaran terhadap fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan yang seharusnya selalu menjaga independensi dan posisi politik. Pendapat pertama mengasumsikan bahwa komunitas pesantren bagaimanapun juga merupakan entitas yang memiliki hak dan aspirasi politik sebagaimana warga negara lain. Mereka didukung oleh argumentasi teologis bagaimana dan mengapa praktik politik praktis dipilih. Pendapat ini semakin kokoh apalagi disokong realitas semakin banyak pemimpin pesantren (kiai) yang terjun dalam dunia politik langsung maupun tidak. Pendapat kedua mengkritik dengan keras bahwa keterlibatan pesantren dalam dunia politik lebih banyak mendatangkan bahaya daripada manfaat.<sup>2</sup> Hal ini mengacu pada realitas politik kekinian yang sering dianggap "kotor". Karena itu, bagaimanapun baik dan kokoh landasan serta argumentasi

teologisnya, pesantren yang terlibat politik akan terseret ke dalam dunia yang “kotor” pula.

Perdebatan seperti itu memang tidak akan pernah selesai, sebab masing-masing akan menunjukkan berbagai argumentasi etis maupun praksis untuk mendukung pendapat mereka. Di dalam artikel ini, kedua pendapat tersebut akan diletakkan sebagai dasar pijak untuk menjawab permasalahan mengapa semakin banyak pesantren yang terlibat dalam politik, apa motif yang melatarbelakangi, dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari keterlibatan tersebut. Sebagaimana yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta, keterlibatan pesantren dalam ranah politik praktis bukan saja berdampak pada eksistensi politik pesantren dan komunitasnya, namun juga berakibat luas bagi masyarakat yang selama ini menjadikan pesantren sebagai sumber rujukan keagamaan dan referensi politik.

### *Teorisasi Politik Pesantren*

Secara historis, fungsi dasar pesantren adalah sebagai lembaga pendidikan Islam. Namun demikian, pesantren juga memiliki pengaruh dan peran politik yang penting di tengah masyarakat tradisional.<sup>3</sup> Oleh sebab itu, pesantren selalu berada dalam pusaran arus tarik-menarik kepentingan politik, sehingga tidak sedikit pesantren yang akhirnya melibatkan diri dalam politik. Tingkat intensitas dan bentuk keterlibatan pesantren dalam politik bisa bermacam-macam, baik secara langsung maupun tidak, sebagaimana kita saksikan pada pelaksanaan momen-momen politik yang penting seperti pemilihan umum (pemilu), pemilihan presiden (pilpres), atau pemilihan umum kepala daerah (pemilukada).

Mengingat kompleksnya permasalahan, pengkajian atas keterlibatan pesantren dalam politik dan dampak-dampak yang ditimbulkannya tidak cukup hanya menggunakan satu teori atau sudut pandang tertentu. Guna mendapatkan kerangka pemahaman yang utuh, kami menggunakan tiga pendekatan teoretis sekaligus sebagai pisau analisis untuk menjelaskan masalah di atas, yakni teori tentang hubungan agama dan negara, teori tentang ekonomi politik,

serta teori hegemoni politik. Berikut akan dijelaskan aspek-aspek signifikan dan hubungan antara ketiga teori tersebut dengan penelitian ini.

### ***Agama dan Politik***

Dalam tulisannya tentang usaha pencarian konsep negara dalam sejarah pemikiran politik Islam, Dien Syamsuddin mengemukakan perdebatan tentang hubungan agama dan negara (politik) yang telah memunculkan tiga paradigma pemikiran dalam politik Islam. Pertama, paradigma integralistik yang mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Agama dan negara tidak dapat dipisahkan (*scheiding van kerk en staat*) karena apa yang menjadi wilayah agama otomatis merupakan wilayah politik atau negara. Kedua, paradigma sekularistik yang mengajukan pemisahan antara agama dan negara. Dalam konteks Islam, pandangan sekularistik menolak pendasaran negara kepada Islam atau paling tidak menolak determinasi Islam akan bentuk tertentu negara. Ketiga, paradigma yang mengajukan pandangan bahwa agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu berhubungan timbal-balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara karena dengan negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara membutuhkan agama karena dengan agama, negara dapat melangkah dalam bimbingan etika dan moral.<sup>4</sup>

Jika dikaitkan dengan sistem politik di Indonesia, dapat dinyatakan bahwa Indonesia menganut aliran ketiga tersebut. Sebagaimana direfleksikan dari Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, hingga kehadiran Kementerian (dulu Departemen) Agama sebagai institusi yang mengurus agama. Dalam negara yang menganut paradigma simbiotik, hubungan agama dan negara (politik) merupakan sebuah hubungan yang saling memengaruhi, saling mengisi, bahkan saling mengoptasi.<sup>5</sup> Karena itu, dilihat dari sisi ini, perpolitikan di Indonesia membuka ruang partisipasi bagi kelompok keagamaan, termasuk komunitas pesantren, untuk terlibat dalam politik.

### *Ekonomi Politik*

Dalam sistem politik liberal sebagaimana dianut di Indonesia, interaksi-interaksi politik tidak dapat diidentifikasi berdasarkan pemahaman keagamaan semata karena juga berkaitan dengan tawar-menawar kepentingan yang bersifat ekonomis. Oleh sebab itu, studi tentang dampak suatu sikap politik sebagaimana yang terjadi di pesantren, juga mesti dilihat dalam kerangka ekonomi politik. Hubungan sistematis dalam teori ekonomi politik sebagaimana digambarkan di atas dapat dilihat pada tiga kemungkinan. Pertama, terdapat hubungan kausal antara ekonomi dan politik yang dalam hal ini sering disebut model ekonomi politik deterministik. Model ini mengasumsikan ada hubungan deterministik antara ekonomi dan politik, yakni politik menentukan aspek-aspek ekonomi dan institusi ekonomi menentukan proses-proses politik. Kedua, ada hubungan timbal-balik antara ekonomi dan politik yang sering disebut model ekonomi politik interaktif. Fungsi-fungsi politik dan ekonomi dianggap berbeda namun saling memengaruhi satu sama lain. Ketiga, terdapat hubungan perilaku yang berkelanjutan atau kontinu antara ekonomi dan politik.<sup>6</sup>

Kegiatan ekonomi, seperti juga kegiatan lain dalam masyarakat, tidak terlepas dari konteks politik, karena sistem politik tidak hanya menentukan *power relation* dalam masyarakat, tetapi juga menentukan nilai atau norma yang sedikit-banyak akan menentukan apa dan bagaimana berbagai kegiatan ekonomi dilaksanakan dalam masyarakat. Menurut Deliarnov,<sup>7</sup> teori ekonomi politik adalah sebuah perspektif analisis ekonomi terhadap proses politik, di dalamnya terdapat kajian tentang institusi politik sebagai entitas yang bersinggungan dengan keputusan ekonomi yang berusaha memengaruhi pengambilan keputusan dan pilihan publik, baik untuk kepentingan kelompok maupun untuk kepentingan masyarakat luas. Di sini dibutuhkan analisis kritis, sebab posisi politik pesantren yang strategis memberi peluang untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari proses-proses politik yang dimainkannya.

### ***Politik Hegemoni***

Teori hegemoni digunakan untuk menjelaskan posisi pesantren dan politik, sebab interaksi komunitas pesantren dengan politik dan kekuasaan sangat memungkinkan pesantren berada dalam posisi inferior dan terhegemoni oleh politik kekuasaan. Hegemoni berkembang menjadi teori politik setelah digunakan Gramsci yang menyebut hegemoni sebagai ide yang mendukung kekuasaan kelompok sosial politik tertentu. Menurut Gramsci, teori hegemoni adalah:

...the supremacy of a social group manifest itself in two ways, as "domination" and as "intellectual and moral leadership". A social group dominates antagonistic groups, which it tends to "liquidate" or to subjugate.<sup>8</sup>

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa teori hegemoni memiliki dua konsep dasar yang penting, yaitu dominasi (*domination*) dan kepemimpinan politik (*intellectual and moral leadership*). Dengan kata lain, hegemoni dijalankan dengan menguasai kepemimpinan politik dan memperkuat superioritas kelompok dominan. Di sini penguasaan dilakukan tidak dengan kekerasan, melainkan melalui bentuk-bentuk persetujuan masyarakat yang dikuasai.<sup>9</sup> Dalam konteks keterlibatan pesantren dalam politik, posisi pesantren dikhawatirkan selalu berada dalam posisi yang terhegemoni. Dengan demikian pesantren hanya menjadi unsur subordinat dari politik sehingga pikiran serta kemampuan kritis dan afektifnya digiring untuk mengabdikan kepada kepentingan kekuasaan politik. Kelas dominan yang direpresentasikan oleh kekuatan politik praktis dapat melakukan penguasaan kepada pesantren menggunakan agama sebagai ideologi. Kekuatan politik praktis dapat merekayasa kesadaran komunitas pesantren sehingga dengan penuh kesadaran mereka rela dan mendukung kekuasaan kelas politik dominan.

### **B. Metode Penelitian**

Artikel ini didasarkan pada penelitian yang kami lakukan di Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta. Pilihan terhadap pesantren tersebut dikarenakan dua pertimbangan. Pertama, Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, adalah salah satu pesantren NU

yang besar serta merupakan pondok pesantren tertua di Yogyakarta dan sekitarnya. Kedua, Pondok Pesantren Al-Munawwir sering terlibat dalam berbagai momentum politik penting seperti pemilu, pilpres, atau pemilukada. Bahkan pengelola Pondok Pesantren Al-Munawwir turut menginisiasi pendirian dua partai politik, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Kebangkitan Nahdlatul Ulama (PKNU), serta salah satu pimpinan pondok pesantren tersebut terlibat sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2009.

Penelitian yang kami lakukan menggunakan data kualitatif sebagai bahan analisis, yang dikumpulkan dari observasi lapangan selama tiga bulan dan wawancara mendalam dengan sejumlah informan yang dipilih secara purposif. Informan adalah sejumlah orang yang dianggap mengetahui informasi tentang data-data yang dibutuhkan. Sumber data primer dalam penelitian diperoleh dari pimpinan pondok pesantren, para santri, dan masyarakat di sekitar pesantren. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari hasil penelusuran dokumen, buku, maupun berita surat kabar yang dianggap relevan dengan tema penelitian.

Setelah data yang diperlukan terkumpul, proses terakhir adalah mempelajari, menelaah, dan menganalisis data tersebut menurut model analisis politik. Tahapan analisis politik diperlukan untuk memetakan peran aktor yang terlibat, melihat proses politik yang melibatkan pesantren, menggali motif yang melatarbelakangi, serta membuat analisis tentang dampak yang timbul dari sebuah proses politik.<sup>10</sup> Data-data yang telah dianalisis selanjutnya dikonseptualisasi dalam artikel ini.

### **C. Pesantren Al-Munawwir dan Dusun Krapyak yang Sedang berubah.**

Krapyak adalah sebuah dusun santri yang terletak di tapal batas Kota Yogyakarta di utara dan Kabupaten Bantul di selatan, tepatnya di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.<sup>11</sup> Sebelum Pondok Pesantren Al-Munawwir didirikan, daerah ini hanya dusun kecil yang dihuni penduduk mayoritas menganut Islam abangan. Namun setelah pesantren menjalankan

aktivitasnya, syiar Islam berkembang dan jadilah masyarakat di dusun ini sebagai masyarakat religius. Beberapa mahasiswa yang berkuliah di UIN Sunan Kalijaga atau Universitas Gadjah Mada memilih tinggal di sana sambil belajar agama di Pesantren Al-Munawwir pada pagi atau sore hari.

Pondok Pesantren Al-Munawwir terletak tepat di jantung Dusun Krapyak dan menjadi pusat berbagai aktivitas sosial, ekonomi, politik, dan keagamaan. Pesantren Al-Munawwir didirikan oleh KH. Moenawwir pada 15 November 1910.<sup>12</sup> Setelah ditinggal wafat oleh pendirinya, KH. Moenawwir, Pesantren Krapyak mengalami kemajuan pesat khususnya ketika dipimpin KH. Ali Maksum. Pada masanya, Pesantren Krapyak menjadi tuan rumah Muktamar Ke-28 NU. Sebagaimana diketahui, dalam muktamar tersebut, NU berhasil merumuskan secara fundamental gagasan pokok tentang depolitisasi NU, yakni kembali ke Khitah 1926 sebagai organisasi atau *jam'iyah* sebagaimana telah diputuskan pada Muktamar Situbondo. Pelaksanaan muktamar NU yang cukup penting itu menunjukkan besarnya pengaruh dan eksistensi Pesantren Krapyak dengan kepemimpinan KH. Ali Maksum di kalangan pesantren-pesantren NU lainnya.

Saat ini Pesantren Al-Munawwir dipimpin oleh KH. Zainal Abidin Munawwir, salah seorang putra KH. Moenawwir. Setelah seratus tahun berkiprah dalam pengajaran keagamaan, saat ini Pesantren Al-Munawwir telah berkembang pesat. Berbagai bangunan baru terus dibangun. Sementara tepat di jantung pesantren berdiri sebuah masjid megah dan menjadi pusat kegiatan pesantren serta warga masyarakat sekitar. Seiring perkembangan zaman dan proses perubahan sosial, Yayasan Pesantren Al-Munawwir telah mengembangkan berbagai lembaga pendidikan, termasuk pendidikan umum, seperti SMK Teknik Mekanika, serta unit kegiatan lainnya. Namun pesantren tersebut tetap setia pada ciri khas yang telah dibangun pendahulunya, yaitu pesantren salaf yang mengembangkan ilmu-ilmu Alquran.

Sementara itu, masyarakat Krapyak yang selama ini hidup menyatu dengan dinamika pesantren juga semakin maju, mengikuti

derap kemajuan yang terjadi di Yogyakarta. Masyarakat masih tetap melihat Pesantren Al-Munawwir sebagai institusi pendidikan keislaman yang penting dan dihormati. Mereka mengaku masih tetap menghormati para kiai dan pengasuh Pesantren. Namun, masyarakat tidak serta merta setuju dengan orientasi politik yang dipilih Pesantren. Bila sebelumnya pilihan politik masyarakat selalu paralel dengan pilihan politik Pesantren, sebagaimana tecermin pada Pemilu 1999 dan 2004—masyarakat turut memenangkan PKB di wilayah Krapyak dan berhasil memberikan satu kursi untuk Nyai Ida Zainal (istri KH. Zainal Abidin Munawwir) di DPRD—kini terjadi perubahan signifikan. Mereka menganggap pilihan politik pada partai tertentu tidak mesti sama dengan orientasi politik Pesantren Al-Munawwir.<sup>13</sup> Partai Kebangkitan Nahdlatul Ulama (PKNU) yang didukung penuh oleh Pesantren pada 2009 ternyata kalah telak dari partai nasionalis seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, dan Partai Demokrat. Kemenangan PDIP merupakan pukulan politik bagi komunitas Pesantren Al-Munawwir karena memperlihatkan pengaruh pesantren yang makin memudar di bidang politik.

#### **D. Proses Keterlibatan Pesantren dalam Politik**

BJ. Bolland di dalam *The Struggle of Islam in Modern Indonesia* mengatakan bahwa ketertarikan umat Islam kepada partai politik bukan saja disebabkan oleh kemampuan partai politik memperjuangkan dan membela kepentingan Islam, tetapi lebih karena adanya tipologi umat Islam dalam memandang hubungan politik dengan Islam. Terdapat tiga tipologi dalam berpolitik ketika dihadapkan dengan Islam, yaitu tipologi ideologis, tipologi kharismatik, dan tipologi rasional. Dalam tipologi ideologis, umat Islam memosisikan berpolitik sama dengan beragama Islam, sehingga semangat pembelaan politik sama dengan semangat membela dan memiliki Islam. Memilih sebuah partai politik sama dengan memilih agama Islam, dan seterusnya ketaatan dalam politik sama dengan ketaatan menjalankan ajaran Islam. Sedangkan tipologi kharismatis mengasumsikan bahwa umat Islam memilih sebuah partai politik

mengikuti sikap dan perilaku seseorang yang dikagumi di sekitarnya. Apa yang dikatakan dan dilakukan figur selalu menjadi rujukan masyarakat. Akibat kekaguman yang berlebihan, umat Islam sering tidak mampu bersikap dan berpikir rasional. Dalam tipologi rasional, kemampuan umat Islam dalam memilih partai politik (atau disebut sikap politik) benar-benar didasarkan pada pandangan rasional. Memilih atau tidak memilih partai politik tertentu dilihat dari kemampuan partai politik menawarkan program yang dapat memperbaiki atau memperjuangkan nasib rakyat.<sup>14</sup>

Menurut Khoirudin, saat ini mayoritas umat Islam masih menempati posisi tipologi pertama dan kedua ketimbang tipologi ketiga.<sup>15</sup> Karena itu, ketika umat Islam memandang bahwa berpolitik sama dengan beragama Islam, karakter itu akan mendorong munculnya tokoh-tokoh agama sebagai tokoh politik. Persoalan umat yang bersinggungan dengan kepentingan politik tidak lagi ditangani oleh politisi profesional, tetapi diambil alih oleh kiai dan tokoh-tokoh pesantren yang merasa memiliki pengaruh dan otoritas keagamaan lebih besar atas umat yang dipimpinnya. Dengan demikian keterlibatan pesantren dalam politik sesungguhnya membuktikan pandangan di atas. Setiap pesantren dan kiai memiliki cara sendirisendiri sesuai sejarah pesantren, spektrum pengaruh pesantren di tengah masyarakat, potensi peluang politik yang dimiliki, serta seberapa besar tarikan politik eksternal yang mereka alami. Untuk mendapatkan gambaran proses tersebut, bagian berikut akan menjelaskan tentang proses-proses politik yang melibatkan pesantren dengan mengambil penggambaran dari proses politik yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta.

### ***Dinamika Politik Pesantren pada Pemilu 2009***

Secara historis, Pesantren Al-Munawwir adalah sebuah pesantren NU yang besar dan berpengaruh di Yogyakarta. Sejak dipimpin pendirinya, KH. Moenawwir, hingga menantunya, KH. Ali Maksum, pesantren tersebut benar-benar berkembang pesat dan memiliki pengaruh besar. Dua tokoh tersebut memiliki spektrum pengaruh yang besar dan luas hingga ke tingkat nasional. Tidak mengherankan

bila apa pun yang difatwakan menjadi pegangan santri dan masyarakat, termasuk dalam urusan politik. Namun setelah ditinggal KH. Ali Maksum, Pesantren Al-Munawwir mulai mengalami guncangan dan fragmentasi internal serta berkembang menjadi beberapa yayasan yang pengelolaannya terpisah. Yayasan Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, yang saat ini dipimpin KH. Zainal Abidin Munawwir dan Yayasan Ali Maksum yang dipimpin KH. Attabiq Ali. Sementara itu, Pesantren Al-Munawwir sendiri terdiri atas beberapa unit pendidikan yang pengelolaannya diserahkan secara otonom kepada beberapa keluarga "bani" Moenawwir. Dengan demikian, aktor politik di Pesantren Al-Munawwir tidak bisa lagi dilekatkan pada KH. Zainal Abidin Munawwir semata.

Dinamika internal tersebut mengakibatkan fragmentasi sikap politik Pesantren Al-Munawwir yang terbelah dalam menghadapi Pemilu dan Pilpres 2009. Berdasarkan garis politik, Pesantren Al-Munawwir adalah pesantren NU yang ikut melahirkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pada Pemilu 1999 dan Pemilu 2004, komunitas pesantren secara penuh mendukung PKB, sehingga partai politik milik warga NU itu berhasil mengumpulkan suara signifikan di wilayah Krapyak. Namun perpecahan yang dialami PKB beberapa tahun lalu mendorong sebagian tokoh di Pesantren Al-Munawwir ikut menyokong pembentukan Partai Kebangkitan Nahdlatul Ulama (PKNU) yang inisiasi pendiriannya dipelopori oleh komunitas kiai NU yang kecewa atas sikap KH. Aburrahman Wahid atau Gus Dur.<sup>16</sup>

Pada Pemilu dan Pilpres 2009, sikap politik Pesantren Al-Munawwir kembali terbelah dalam beberapa partai politik, yang dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, kelompok yang mendukung Partai PKNU yang disebut sebagai Partai Ulama setelah PKB dilanda perpecahan eksternal dan dianggap tidak mampu memperjuangkan visi pesantren dan ulama. Pendukung PKNU adalah Yayasan Pesantren Al-Munawwir yang dipimpin KH. Zainal Abidin Munawwir. Bahkan Nyai Ida Fatimah Zainal (istri Kiai Zainal Abidin Munawwir yang memimpin Pesantren Putri di Blok R) juga terlibat sebagai calon anggota legislatif untuk DPRD DI Yogyakarta dari PKNU. Kedua, kelompok yang mendukung Partai Demokrat,

dalam hal ini dipelopori oleh Yayasan Ali Maksum yang dipimpin KH. Attabiq Ali. Hal itu bisa dimengerti sebab KH. Attabiq Ali adalah mertua dari Anas Urbaningrum, politisi Partai Demokrat yang belakangan menjadi ketua umum partai tersebut. Ketiga, kelompok yang tidak memiliki afiliasi politik yang jelas. Termasuk dalam kelompok ini adalah KH. Ahmad Warson Munawwir yang memimpin Pondok Pesantren Krapyak di Blok L.

Hasil Pemilu 2009 di Desa Panggungharjo, untuk DPRD DI Yogyakarta dimenangkan PDIP yang memperoleh 5.220 suara, diikuti Partai Demokrat di posisi kedua dengan 4.147 suara. Selanjutnya Partai Golkar memperoleh 2.263 suara dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperoleh 1.644 suara. Sedangkan PKNU yang mencalonkan Hj. Ida Fatimah, S.Ag., M.Si. atau istri KH. Zainal Abidin Munawwir hanya memperoleh 1.295 suara. Lebih lanjut, berikut tabel rekapitulasi jumlah suara 56 tempat pemungutan suara (TPS) di Desa Panggungharjo:

PARTAI	JUMLAH SUARA	PERSENTASE
PDIP	5.220	27
Demokrat	4.147	21
Golkar	2.263	11,7
PKB	1.644	8,5
PKNU	1.295	6,75
Lainnya	4.612	24
Total Suara Sah	19.181	100

*Sumber: PPS Desa Panggungharjo*

Bahkan di TPS yang berada di lingkungan Krapyak Kulon atau di sekitar lingkungan Pesantren Al-Munawwir, yakni TPS 44, 45, 46, 47, 54, 55, dan 56, PKNU hanya mengumpulkan 162 suara. Bandingkan dengan suara Partai Demokrat yang berhasil mengumpulkan 300 suara atau unggul hampir 40 persen dari PKNU.<sup>17</sup> Hasil itu selain disebabkan oleh popularitas SBY juga

menandakan kemenangan kelompok Yayasan Ali Maksud yang dipimpin KH. Attabiq Ali. Artinya, PKNU tidak memperoleh suara signifikan dan Nyai Ida Zainal gagal lolos sebagai calon anggota DPRD Provinsi DI Yogyakarta. Merespons kegagalan tersebut, komunitas pesantren Krapyak lebih mengedepankan alasan yang cenderung apologetik sebagaimana dituturkan KH. Zainal Abidin Munawwir:

Kegagalan PKNU pada pemilu kemarin karena, pertama, Allah belum mengizinkan PKNU untuk menang dan, kedua, umumnya masyarakat belum mengetahui secara utuh tentang visi dan misi politik yang diusung oleh PKNU. Mereka belum tahu bahwa PKNU adalah partai ulama yang memperjuangkan kepentingan umat Islam.<sup>18</sup>

Apa pun yang dikatakan KH. Zainal Abidin Munawwir, fakta tersebut menggambarkan bahwa sikap maupun dukungan politik pesantren pada sebuah partai politik tertentu tidak selalu paralel dengan dukungan masyarakat yang selama ini berada dalam pengaruh pesantren. Secara luas, legitimasi pesantren sebagai sumber moralitas politik menjadi tidak dihiraukan oleh masyarakat. Hal itu misalnya dapat dicermati pada pernyataan Kepala Dukuh Krapyak Kulon, Hunain, bahwa masyarakat saat ini tidak lagi menjadikan sikap politik kiai dan pesantren sebagai pedoman. Penyebabnya, para kiai dinilai terlalu sibuk dengan aktivitas politik sendiri yang sering tidak memiliki hubungan langsung dengan kehidupan masyarakat.<sup>19</sup>

### ***Bentuk-bentuk Keterlibatan Politik di Pesantren***

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa keterlibatan pesantren dalam politik mengambil bentuk yang bermacam-macam, sesuai dengan peran yang dimainkan oleh kiai, ustaz, nyai, atau santri. Kita dapat membuat beberapa model keterlibatan pesantren dalam politik dengan mengamati berbagai proses keterlibatan politik pesantren yang terjadi selama ini.<sup>20</sup>

Pertama, terlibat secara langsung sebagai praktisi dan aktor politik yang terjun sebagai pengurus dan aktivis partai politik tertentu. Hal itu secara langsung melibatkan elite pesantren, yakni kiai dan keluarganya atau ustaz senior yang memiliki hubungan dengan kiai. Keterlibatan secara langsung memberikan peluang

politik yang lebih besar bagi elite pesantren untuk mencapai jabatan politik yang lebih baik. Posisi tersebut diharapkan memberikan ruang politik untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan kepentingan pesantren, karena jabatan-jabatan politik turut menentukan kebijakan dan program-program pembangunan. Kasus terjun langsung dalam politik itu diperlihatkan oleh Nyai Ida Zainal di Pesantren Al-Munawwir.

Kedua, sebagai kekuatan pendukung partai politik tertentu dengan cara memberikan dukungan di balik layar. Pesantren menginisiasi berbagai kegiatan keagamaan yang dimanfaatkan oleh partai politik untuk menyosialisasikan visi politiknya. Pada banyak kasus, pesantren menggelar berbagai even keagamaan yang disponsori oleh kekuatan politik tertentu yang melibatkan umat Islam dalam jumlah besar. Hal itu antara lain tecermin dari penyelenggaraan pertemuan kiai yang dilaksanakan di sebuah hotel berbintang di Yogyakarta. Kegiatan bertajuk silaturahmi tersebut disponsori oleh politisi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, yang juga menantu KH. Attabiq Ali, pimpinan Yayasan Ali Maksum, Krapyak.<sup>21</sup>

Ketiga, sebagai legitimasi politik yang sering dimanifestasikan dalam bentuk restu politik pada partai atau tokoh politik tertentu yang tidak berasal dari lingkungan pesantren. Hal seperti itu bagi banyak praktisi politik dianggap penting, sebab dalam sistem politik Indonesia yang ideologis dan tradisional, legitimasi keagamaan sangat dibutuhkan. Dan citra sebagai seorang Muslim yang baik, saleh, serta dekat dengan ulama turut menentukan elektabilitas seorang praktisi politik di hadapan pemilih Muslim. Berkaitan dengan itu, pesantren sering menerima "order" kunjungan politisi, calon anggota legislatif, capres, atau komunitas partai politik tertentu yang sedang berkompetisi. Hal itu dilakukan sebagai proyek pemoleasaan citra diri sebagai seorang Muslim yang baik yang dekat dengan komunitas agama atau pesantren.

Sebagai contoh, pada Pilpres 2004, semua calon presiden<sup>22</sup> pernah berkunjung ke Pesantren Al-Munawwir untuk meminta restu dan doa. Kunjungan Megawati yang saat itu diterpa kontroversi kepemimpinan politik perempuan, justru dimanfaatkan dengan baik

oleh tim suksesnya untuk membuktikan bahwa tidak semua pesantren menolak presiden perempuan. Demikian pula saat Pilpres 2009, meskipun hanya Ny. Mufida Yusuf Kalla, istri capres M. Jusuf Kalla, yang berkunjung ke Krapyak, di televisi diperlihatkan safari politik dari capres yang berkunjung ke pesantren lainnya di Pulau Jawa. Semua seakan berlomba paling cepat mengunjungi pesantren.

### **E. Memahami Motif Politik Pesantren**

Proses-proses politik yang terjadi di pesantren menunjukkan bahwa keterlibatan pesantren dalam politik didorong oleh motif politik yang beragam. Motif yang dimaksud di sini adalah dorongan dan kekuatan yang berasal dari dalam pesantren, baik disadari maupun tidak, untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh sebab itu, menjelaskan motif keterlibatan pesantren dalam politik juga bukan sesuatu yang mudah. Di sini kita memasuki ranah perdebatan yang sensitif, yakni berusaha menjelaskan berbagai alasan yang mendorong pesantren terlibat dalam politik—hal yang sering kali tidak diakui oleh komunitas pesantren. Dibutuhkan suatu analisis yang lebih dalam dan cermat, karena keterlibatan pesantren dalam politik dipengaruhi berbagai faktor yang saling terkait, baik yang berasal dari kondisi-kondisi internal pesantren maupun tekanan eksternal. Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi di Pesantren Al-Munawwir, setidaknya terdapat empat motif atau alasan mengapa pesantren terlibat dalam politik.

#### ***Doktrin Keagamaan***

Sebagai lembaga pendidikan Islam yang mengkaji dan mengajarkan ilmu-ilmu keislaman, basis argumentasi politik pesantren jelas bersandar pada pemahaman keagamaan yang kuat. Pemahaman tersebut disarikan dari penjelasan Alquran dan Sunah serta paparan ulama-ulama terdahulu yang dijelaskan dalam berbagai kitab klasik (kitab kuning) yang sering dikaji di pesantren. Umumnya komunitas pesantren memandang bahwa politik merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran Islam. Bernegara mempunyai koherensi dengan beragama yang direfleksikan dari pemikiran bahwa pendirian negara sesuai konsensus (*ijma'*) ulama hukumnya *fardhu kifâyah*. Pandangan

ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan, *mâ lâ yatimmu al wâjib illâ bihi, fahuwa wâjib* (kewajiban yang tidak sempurna tanpa alat atau sarana, alat atau sarana itu hukumnya wajib). Dengan logika ini, bila menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah wajib, sedangkan alat bagi terciptanya kemaslahatan tersebut (salah satunya) adalah negara, hukum mendirikan negara juga wajib (*fardhu kifâyah*).

Dalam teori politik Islam, pemahaman seperti itu lebih dikenal dengan paham akomodasionis yang memandang politik sebagai bagian dari ajaran agama yang tidak dapat dipisahkan.<sup>23</sup> Konsekuensi dari berbagai pendapat tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa mengelola negara dengan sebaik-baiknya sama hukumnya dengan mendirikan negara. Karena itu, ketika negara telah didirikan tetapi hanya menimbulkan mudarat, justru akan bertentangan dengan tujuan awal pembentukan negara dalam Islam, yakni membentuk masyarakat sejahtera di bawah ampunan Allah. Karena itu, menurut KH. Zainal Abidin Munawwir,<sup>24</sup> berpolitik merupakan salah satu kewajiban *kifâyah* umat untuk menegakkan nilai dan ajaran Islam.

### ***Mobilitas Struktural dan Kontekstualisasi Pesantren***

Politik adalah suatu praktik tentang usaha untuk meraih kekuasaan politik, sebab menguasai kekuasaan politik memberi ruang bagi kekuatan-kekuatan politik untuk merealisasikan visi, misi, dan program politik yang akan dilaksanakan. Inilah kenyataan dalam kehidupan politik sejak demokrasi dicanangkan pertama-tama dalam bentuknya yang paling sederhana. Pesantren tentu menyadari fakta tersebut, sehingga keterlibatan pesantren dalam politik harus diletakkan dalam konteks mobilitas struktural untuk memperjuangkan berbagai nilai, doktrin, semangat, aspirasi, dan kepentingan yang dianut pesantren. Keberhasilan meraih jabatan publik yang penting sebagai presiden, anggota DPR, gubernur, bupati, atau wali kota, diyakini mampu membuka ruang partisipasi bagi pesantren untuk berbuat lebih banyak. Justru bagi kiai, ungkapan sebagian kalangan bahwa pesantren hanya meneguhkan diri di wilayah kultural, sekadar melakukan kerja-kerja kemasyarakatan, merupakan

pernyataan yang keliru dan ahistoris serta harus dicurigai. Hal itu misalnya diungkapkan oleh Kiai Miftahul Akhyar, seorang kiai dari Jawa Timur. Dalam tulisannya di harian *Republika*, ia menyatakan:

Umat Islam khususnya NU harus pandai menyaring pernyataan yang tampak manis tetapi sebenarnya akan memberangus agar NU dan Islam di luar pemerintahan dan dikuasai orang Islam tetapi tidak mengerti kemauan dan kebutuhan Islam. Justru pernyataan agar kiai dan NU jangan terlibat politik merupakan usaha dari kelompok sekuler untuk melemahkan Islam.<sup>25</sup>

Lebih luas, keterlibatan pesantren dalam politik juga dapat dilihat sebagai upaya pesantren untuk memperluas peran dan sumber daya yang dimiliki selama ini. Selama beberapa dasawarsa, di bawah tekanan Orde Baru, pesantren hanya diperlakukan sebagai lembaga kultural yang berada di luar struktur kekuasaan politik. Padahal, pesantren menyimpan potensi dan pengaruh politik yang besar. Selama ini pesantren hanya dijadikan sebagai objek politik, sekadar alat politik bagi partai yang bisa digerakkan saat momentum pemilu. Namun, setelah proses politik itu usai, pesantren dan komunitasnya sering dilupakan dari hingar-bingar politik.

Komunitas pesantren tentu menyadari hal tersebut dan mulai melakukan konsolidasi politik secara sistematis. Komunitas NU yang menguasai ribuan pesantren mendeklarasikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menandai momentum politik baru, dengan komunitas pesantren memperluas wilayah dakwah, dari ranah kultural ke ranah struktural. Politik menjadi sarana baru bagi pesantren untuk unjuk peran maupun kontekstualisasi diri. Fenomena itu bisa dilihat sebagai bentuk respons politik pesantren terhadap dinamika eksternal. Apalagi sistem politik pasca-Reformasi membuka ruang politik yang lebih luas kepada pesantren untuk terlibat dalam usaha-usaha politik menyelesaikan beragam masalah kebangsaan. Karena itu, keterlibatan dalam politik, bagi sebagian komunitas pesantren, adalah panggilan sejarah untuk berbuat bagi kemajuan bangsa. Bila sebelumnya pesantren hanya diposisikan sebagai lembaga moral yang terkungkung di menara gading, tiba saatnya bagi pesantren melakukan kerja-kerja politik untuk kebaikan

kehidupan berbangsa.

Menurut Ahmad Patoni,<sup>26</sup> usaha komunitas pesantren untuk mendirikan PKB membuktikan bahwa pesantren melihat efektivitas perjuangan moral pesantren pada level kekuasaan hanya bisa diwujudkan melalui jalan politik. Melalui partai politik, pesantren meyakini mampu melakukan manuver taktis dalam mewujudkan kebijakan publik yang memihak kepada kepentingan masyarakat. Selain pertimbangan tersebut, politik pesantren juga memiliki tujuan yang tidak kalah penting, yaitu memberikan benteng moralitas bagi sebuah kehidupan politik yang sehat dan bermoral, sebab perilaku para politikus diyakini banyak menyimpang dari koridor moralitas keberagamaan. Demi mencapai tujuan dan ambisi politik, mereka rela melakukan apa pun. Kehadiran pesantren diharapkan dapat memberikan sandaran dan perspektif moral sehingga politik akan berjalan sesuai dengan rel kebenaran dan berdasarkan landasan yang benar.

Di luar soal mobilitas struktural dan kontekstualisasi diri yang perlu diwujudkan sesuai semangat zaman, pesantren pada dasarnya juga didesak oleh kekuatan politik eksternal untuk terlibat. Fenomena itu misalnya dapat disaksikan pada Pilpres 2004. Saat itu PDIP yang mencalonkan Megawati Sukarnoputri ingin menguasai massa pesantren dengan menduetkan ketua PDIP tersebut dengan Ketua PBNU KH. Hasyim Muzadi. Pencalonan KH. Hasyim Muzadi diharapkan dapat mewakili aspirasi umat Islam, khususnya NU, sekaligus mendorong dukungan politik dari komunitas pesantren yang jumlahnya diakui sangat besar. Meskipun eksperimen politik itu tidak berhasil memenangkan pemilu, kasus tersebut menunjukkan bahwa alasan keterlibatan pesantren dalam politik juga karena desakan eksternal yang kuat. Apalagi bila desakan tersebut juga dibarengi dengan tawaran-tawaran ekonomi untuk kepentingan pembangunan pesantren.

### ***Kepentingan Ekonomi***

Liberalisasi dan kapitalisasi dunia pendidikan yang semakin massif di Indonesia akhir-akhir ini, secara tidak terelakkan juga menimpa

pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional yang dikelola secara swadaya oleh kiai dan masyarakat. Biaya operasional pendidikan yang semakin tinggi berdampak langsung pada kondisi finansial pesantren. Dengan manajemen keuangan yang sederhana, pesantren harus memerhatikan kemampuan pendanaan yang dimiliki. Dalam sejarah perkembangan pesantren, beberapa pesantren “terpaksa” gulung tikar karena ketidakmampuan pembiayaan dalam menutupi biaya operasional pendidikan yang dijalankan. Pendapatan yang diperoleh dari iuran santri dan infak donatur yang tidak tetap, merupakan persoalan yang membutuhkan solusi yang tepat.<sup>27</sup>

Situasi tersebut sering mendorong para kiai dan pengelola pesantren memikirkan cara-cara lain yang mudah dan efektif untuk memperoleh bantuan yang bisa digunakan dalam pembangunan pesantren. Di beberapa tempat, pengelola pesantren berhasil memperoleh bantuan keuangan secara reguler dari pemerintah daerah atau Kementerian Agama. Bahkan sebagian mendapat bantuan fisik berupa pembangunan infrastruktur pesantren. Bantuan-bantuan itu biasanya tidak gratis, karena pihak pemberi bantuan menuntut hal-hal tertentu. Dalam kasus di Pesantren Al-Munawwir, tawaran untuk menerima bantuan secara reguler dari pemerintah diringi dengan permintaan untuk mengakomodasi kurikulum yang disediakan Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan Nasional. Pesantren Al-Munawwir menyikapi secara kreatif dengan mendirikan pesantren baru di lingkungan pesantren Krapyak yang mengelola Pesantren Ali Maksum dengan basis pengetahuan moderen. Sementara Pesantren Al-Munawwir tetap bertahan sebagai pesantren salafi yang mengkhususkan diri dalam pengajaran ilmu agama.<sup>28</sup>

Selain menempuh cara tersebut, tidak jarang pesantren menempuh jalan pintas dengan melibatkan diri dalam politik kekuasaan yang dianggap cara yang cepat dan efektif untuk membangun jaringan donasi baru. Dengan pengaruh sosial dan politik yang kuat di masyarakat, pesantren dapat melakukan *bargaining* politik dengan para politisi yang memerlukan dukungan

politik pesantren, dari sekadar dukungan moral dan pembentukan citra hingga mobilisasi suara rakyat dalam pemilu, pilpres, atau pilkada. Meskipun secara terbuka pihak pengelola pesantren sering membantah melakukan tawar-menawar politik dengan kompensasi ekonomi, fakta tentang bantuan yang diterima juga diakui. Di Pesantren Al-Munawwir, misalnya, donasi dari kelompok politik banyak diterima pada era kepemimpinan KH. Ali Maksum yang juga politisi NU. Demikian pula saat kepemimpinan KH. Zainal Abidin Munawwir sekarang, pesantren juga menerima bantuan, meskipun diakui tidak terlalu banyak.

Salah satu tokoh politik yang disebut banyak membantu Pesantren Al-Munawwir Krapyak adalah Dr. M. Alwi Shihab. Alwi Shihab adalah ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) periode 1999-2004 sebelum dilengserkan oleh Gus Dur karena dianggap membangkang. Alwi Shihab juga merupakan menteri luar negeri pada era Gus Dur dan menteri koordinator kesejahteraan rakyat pada kabinet SBY-JK. Dukungan elite PKB kepada Pesantren Al-Munawwir dapat dimaklumi, karena pesantren tersebut turut merintis pembentukan PKB. Bahkan Pesantren Al-Munawwir secara terbuka turut mengampanyekan PKB pada Pemilu 1999 dan 2004. Selain memberikan bantuan secara langsung, elite PKB yang dipimpin Alwi Shihab juga memfasilitasi bantuan dari donatur-donatur utama di Timur Tengah untuk pembangunan masjid dan beberapa gedung baru yang cukup megah. Pola hubungan seperti itu acap kali dibantah oleh pesantren sebagai bermotif politik. Namun kemenangan PKB pada Pemilu 2004 di wilayah Krapyak dan sekitarnya membuktikan bahwa relasi ekonomi politik seperti itu sering terjadi di pesantren. Tampaknya dukungan-dukungan politik tersebut paralel dengan bantuan yang diterima.

## **F. Dampak Keterlibatan Pesantren dalam Politik**

Pro-kontra yang mengiringi keterlibatan sebagian pesantren dalam politik praktis pada dasarnya merupakan wujud ekspektasi umat terhadap posisi pesantren yang terhormat. Sejak lama umat Islam di Indonesia menempatkan pesantren sebagai sumber rujukan moralitas

keagamaan. Para kiai adalah panutan umat yang fatwa serta nasihatnya menjadi pegangan masyarakat. Bahkan menurut Zamakhsyari Dhofier, sebagaimana dikutip Khoirudin,<sup>29</sup> peran kiai merupakan faktor determinan kebijakan sosial dan pengambilan keputusan-keputusan penting menyangkut keberhasilan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pesantren merupakan pilar bagaimana nilai-nilai moralitas dan nilai-nilai keagamaan dijalankan di tengah masyarakat.

Persoalan mengemuka ketika pesantren yang merupakan referensi nilai-nilai keagamaan itu tertarik ke dalam dunia politik praktis dengan berbagai alasan yang diyakininya. Di sinilah sebagian orang menilainya sebagai bentuk penyimpangan terhadap peran sosial yang selama ini dijalankan pesantren. Apalagi keterlibatan pesantren dalam politik sering disertai aktivitas-aktivitas partisan sesuai tuntutan kepentingan politik yang terkadang tidak sejalan dengan logika masyarakat umum. Di sini kiai dan pesantren tidak dapat memertahankan legitimasi keagamaannya karena masyarakat telah meragukan otoritas dan ketulusan yang dimiliki, yakni apakah pesantren sedang berbicara atas dasar kepentingan agama dan kepentingan umat atau atas dasar kepentingan partai politik atau politisi yang didukung pesantren.

Berbagai fenomena politik yang berkaitan dengan dukung-mendukung politik di dunia pesantren menunjukkan bahwa aktivitas politik pesantren ternyata memiliki dampak sangat luas. Analisis terhadap hal ini bisa dimulai dari perdebatan doktrinal keagamaan tentangan hubungan agama dan negara di Indonesia, hingga dampak-dampak material yang mungkin diperoleh oleh pesantren. Dengan demikian pesantren terlibat politik bukanlah sebuah frasa sederhana, tetapi memiliki implikasi yang luas yang mesti dianalisis secara hati-hati.

### ***Delegitimasi Peran Pesantren***

Keterlibatan pesantren dalam politik berimplikasi terhadap eksistensi pesantren di satu sisi dan terhadap kekuatan politik yang didukung oleh pesantren di sisi lain. Bagi pesantren yang kiaiinya

terlampau sibuk mengurus politik akan berkurang waktu dan perhatiannya dalam mengurus pesantren. Hal itu disebabkan aktivitas politik membuat para kiai harus sering keluar untuk koordinasi, rapat, dan kegiatan politik lainnya. Di Pesantren Al-Munawwir, aktivitas politik dari Nyai Ida Zainal selama Pemilu 2009 membuat pengelolaan pesantren putri yang dipimpinnya cukup terbengkalai. Hal seperti itu yang harus benar-benar diperhatikan oleh kiai atau pimpinan pesantren bila mereka ingin terlibat dalam politik.

Banyak pesantren yang mengalami penurunan kualitas karena kiai atau pimpinan pesantrennya lebih sibuk berpolitik. Pesantren yang terlampau aktif dalam peran politiknya (*political oriented*) mungkin akan ditinggal santrinya. Orangtua santri yang kritis akan memilih pesantren yang lebih menjaga independensinya terhadap politik praktis. Pada titik ini, dapat disimak bahwa masyarakat yang sebelumnya sangat menghormati pesantren dan selalu mengikuti anjuran serta arahan pesantren, mempunyai dasar untuk menentang legitimasi fatwa pesantren, khususnya terkait isu sosial dan politik dalam kasus pemilu. Dalam konteks penentangan atau penolakan itu, anjuran pesantren untuk memilih sebuah partai politik tertentu juga sering membuat umat terpecah dalam politik dukung-mendukung yang tidak kondusif. Perpecahan suara yang sering diiringi konflik-konflik sosial, membuktikan bahwa aktivitas politik praktis yang dilakoni pesantren lebih banyak menimbulkan mudarat.

Sementara itu, independensi pesantren yang selama ini menjadi kekuatan utama dalam menjaga nilai dan moralitas masyarakat akan semakin sulit ditegakkan. Bahkan banyak pesantren yang masuk dalam lingkaran kekuasaan politik secara sadar tunduk pada keputusan-keputusan politik. Mereka harus turut menjalankan berbagai program dan kebijakan pemerintah, meskipun hal tersebut diyakini merugikan kepentingan pesantren. Eksistensi sejumlah pesantren salafi kini sedang dipertaruhkan di hadapan kebijakan pendidikan nasional yang menginginkan perlunya sejumlah penambahan kurikulum pendidikan modern dalam kurikulum pesantren yang dianggap tradisional dan kurang prospektif.

Banyak pesantren secara sadar mengikuti kebijakan tersebut, tentu disertai argumentasi bahwa masyarakat juga telah berubah. Dengan demikian, penting bagi pesantren untuk bisa merespons perubahan tersebut dengan menyesuaikan kurikulum dan sistem pendidikan pesantren dengan kebutuhan masyarakat. Ada pula pesantren, seperti Pesantren Al-Munawwir, yang melakukan langkah kreatif dengan menyelenggarakan unit pendidikan khusus yang mengikuti sistem pendidikan nasional. Sejak lima tahun lalu, Yayasan Pesantren Krapyak mendirikan SMK Mekanika yang memberikan kemampuan teknik bagi santrinya. Para santri tidak diwajibkan mengikuti pendidikan di SMK tersebut. Namun, yang ingin menambah pengetahuan, bisa belajar di sana.

### *Kompensasi Ekonomi dan Politik Pragmatis*

Dampak lain dari keterlibatan pesantren dalam politik juga terlihat pada perubahan sarana fisik pesantren. Hal itu membenarkan penjelasan teori ekonomi politik deterministik yang memandang bahwa interaksi-interaksi politik selalu bermotif ekonomi.<sup>30</sup> Pesantren menjadikan pengaruh dan legitimasi sosial kegamaan yang dimilikinya sebagai bahan dalam tawar-menawar dengan kepentingan kelompok politik. Bantuan-bantuan material kerap kali datang ke pesantren sebagai buah dari konsensus politik yang dilakukan. Hal itu memunculkan rumor tentang politik uang yang sering dipelesetkan menjadi *hight cost politics*. Transaksi uang dengan suara dapat dilakukan dengan berbagai cara baik langsung maupun tidak. Transaksi langsung mengandung pengertian transaksi yang dilakukan kelompok kepentingan langsung, yakni memberikan uang dengan janji suara yang akan disalurkan melalui pesantren. Sedangkan transaksi tidak langsung dapat berupa benda atau apa saja yang dapat dipertukarkan dengan kepentingan kiai maupun “pembangunan” pesantren. Alhasil, posisi politik pesantren menjadi pragmatis dan benar-benar digunakan sebagai kekuatan untuk melanjutkan pembangunan pesantren.

Pada Pemilu 1999 dan 2004, hampir semua pesantren NU, termasuk Pesantren Al-Munawwir, mendukung penuh PKB.

Dukungan tersebut mendatangkan banyak bantuan material. Pembangunan gedung pendidikan pesantren setinggi dua lantai yang menelan biaya miliaran rupiah di Pesantren Al-Munawwir diakui sebagian atas dukungan Dr. M. Alwi Shihab.<sup>31</sup> Ketua PKB itu juga memfasilitasi berbagai bantuan yang berasal dari para donatur di Timur Tengah. Politik kompensasi ekonomi tersebut menarik diamati karena di satu sisi bermanfaat untuk melanjutkan pembangunan berbagai sarana dan prasarana pesantren, yang juga berarti menciptakan sumber pendanaan alternatif bagi kepentingan keuangan pesantren. Tetapi di sisi lain menyeret pesantren pada pusaran politik pragmatis yang selalu mengondisikan politik dengan uang. Terjadilah apa yang disebut “kapitalisasi pesantren” dalam transaksi-transaksi politik di dunia pesantren. Suatu hal yang mengkhawatirkan sebab akan merusak integritas moral serta legitimasi dan eksistensi pesantren itu sendiri. Secara luas bahkan akan melemahkan posisi pesantren sebagai kekuatan *civil society* yang diharapkan mampu berhadapan dengan kekuasaan.

### ***Resistensi Masyarakat terhadap Pesantren***

Secara tradisional masyarakat memandang pesantren sebagai sumber legitimasi moral. Kiai dan pesantren adalah panutan serta pembimbing umat. Sebagai sumber moral dan panutan umat, pesantren diharapkan menjadi teladan dalam mempraktikkan Islam ke dalam perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, kiai dan komunitas pesantren tentu harus menjaga diri dari hal-hal yang bisa merusak kewibawaan dan integritas, semisal melibatkan pesantren dalam politik praktis. Memang tidak selamanya politik praktis merupakan “barang kotor”, tetapi pemahaman masyarakat umum telah menempatkannya sebagai media persaingan perebutan kekuasaan. Para kiai pesantren tentu akan menerima imbas dari persepsi umum tersebut. Konsekuensinya, predikat *uswah hasanah* pesantren tentu akan tercerabut legitimasi sosialnya. Petuah, nasihat, dan fatwa yang dikeluarkan kiai akan dibaca dalam konteks politik.

Sejauh ini, ada beberapa bentuk resistensi masyarakat terhadap keterlibatan politik pesantren. Pertama, masyarakat menilai

pesantren yang terlalu politis akan tercerabut dari fungsi-fungsinya sebagai lembaga pendidikan Islam. Bahkan secara mencolok sebagian orang tua yang kritis menolak memasukkan anak mereka ke dalam pesantren yang terlalu terlibat politik.<sup>32</sup> Fenomena itu juga tampak di Pesantren Al-Munawwir yang mengalami penurunan jumlah santri secara signifikan. Kedua, resistensi yang paling nyata tentu pembangkangan politik yang dilakukan oleh masyarakat untuk tidak memilih partai yang didukung secara khusus oleh pesantren. Hal itu tentu menarik karena kontradiktif dengan temuan Bolland bahwa masyarakat Muslim tradisional selalu mendukung sikap politik yang dianut tokoh agama atau pesantren.<sup>33</sup> Mungkin fenomena pesantren dan politik yang terjadi di Pesantren Al-Munawwir dapat membantu menjelaskan bahwa saat ini telah terjadi pergeseran sikap politik pemilih Muslim, dari tipologi ideologis dan kharismatis ke sikap politik yang lebih rasional. Seiring demokratisasi dan perkembangan pendidikan, masyarakat semakin mampu membedakan antara sikap pesantren sebagai sikap keagamaan yang patut dicontoh, ditaati, dan diteladani serta sikap pesantren yang sarat politik kepentingan yang tidak berkaitan dengan ajaran keagamaan sehingga tidak mesti ditaati.

### **G. Penutup**

Keterlibatan pesantren di ranah politik yang semakin marak akhir-akhir ini secara nyata telah menimbulkan berbagai dampak cukup signifikan. Pertama, keterlibatan pesantren dalam politik secara nyata telah mendeligitimasi peran pesantren sebagai otoritas moral dan referensi keagamaan. Banyak pesantren mengalami penurunan kualitas karena kiai atau pimpinan pesantren lebih sibuk berpolitik. Kondisi itu membuat masyarakat memandang pesantren tidak lagi objektif dalam sikap-sikap politiknya, karena cenderung menguntungkan kelompok politik tertentu sehingga terjadi delegitimasi peran pesantren.

Kedua, pesantren telah turut mengukuhkan politik pragmatis karena pesantren telah menjadikan politik sebagai ajang untuk mempertukarkan dukungan politik dengan kompensasi-kompensasi

materi yang diterima—suatu kondisi yang semakin menjauhkan pesantren dari masyarakat. Setidaknya hal itu semakin terasa belakangan ini, ketika masyarakat mulai menyoroiti sikap politik pesantren yang dianggap hanya merusak independensi pesantren dan memecah umat ke dalam politik partisan.

Ketiga, terjadi resistensi masyarakat atas sikap politik pesantren. Hal tersebut secara nyata dapat disaksikan dalam sikap politik masyarakat yang seakan-akan membangkang terhadap pilihan politik pesantren. Seiring demokratisasi dan perkembangan pendidikan, masyarakat semakin bisa membedakan antara sikap pesantren sebagai sikap keagamaan yang patut dicontoh, ditaati, dan diteladani serta sikap pesantren yang sebetulnya murni politik kepentingan yang tidak berkaitan dengan ajaran keagamaan sehingga tidak harus ditaati.

Di sini terlihat bahwa pesantren perlu hati-hati dalam menentukan sikap politiknya, sebab keterlibatan politik pesantren memiliki dampak yang tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Apalagi bila kesibukan politik telah melalaikan kiai maupun pengelola pesantren dari urusan pendidikan di pesantren. Mungkin di masa depan pesantren perlu melakukan revitalisasi peran politik yang lebih sesuai dengan semangat zaman dan keinginan masyarakat yang sudah semakin rasional. Bagaimanapun politik pesantren pada dasarnya bukan politik kekuasaan, tetapi politik kerakyatan yang bergerak pada ranah kultural.[]

### **Catatan:**

<sup>1</sup> Studi tentang pesantren di antaranya adalah Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3S, 1990); Hiroko Horikoshi, *Kiai dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: LP3S, 1987); Endang Turmudi, *Kiai dan Perselingkuhan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKiS, 2004); Khoirudin, *Politik Kiai*, (Yogyakarta: Averroes Press, 2005); dan Ahmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren dalam Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007). Namun, berbagai penelitian tersebut belum menunjukkan dampak keterlibatan pesantren dalam politik dalam satu dasawarsa terakhir.

<sup>2</sup> Khoirudin, *Politik Kiai*, hlm. ix-x.

<sup>3</sup> Lihat Horikoshi, *Kiai dan Perubahan*.

<sup>4</sup> Dien Syamsuddin, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Pemikiran

Politik Islam”, dalam *Jurnal Ulumul Qur’an* No. 2, Vol. IV, 1993.

<sup>5</sup> Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*, (Jakarta: Paramadina, 1996).

<sup>6</sup> Martin Staniland, “What is Political Economy?: A Study of Social Theory and Underdevelopment”, dalam Deliarnov, *Ekonomi Politik*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 9.

<sup>7</sup> Lihat penjelasan Staniland, “What is Political”, hlm. 9.

<sup>8</sup> Pembahasan tentang teori hegemoni Gramsci dapat dibaca dalam tulisan Nezar Patria dan Andi Arif, *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

<sup>9</sup> Lihat David Marsh dan Gerry Stocker (eds.), *Theory and Methods in Political Science*, (New York: Palgrave MacMillan, 2002).

<sup>10</sup> Disarikan dari *Pembangunan Pemukiman (RPP) Desa Panggunharjo 2009-214 Kecamatan Sewon Bantul Yogyakarta*, (2009).

<sup>11</sup> Data tentang sejarah, perkembangan, dan manajemen pendidikan di Pesantren Al-Munawwir diolah dari buku *Sejarah dan Perkembangan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta*, (Yogyakarta: Pengurus Pusat Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, Cet. II 2001).

<sup>12</sup> Wawancara dengan Hunain, kepala Dusun Krapyak Kulon, 5 Oktober 2010.

<sup>13</sup> B.J. Bolland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1982).

<sup>14</sup> Khoirudin, *Politik Kiai*.

<sup>15</sup> Wawancara dengan KH. Zainal Abidin Munawwir, 7 Oktober 2010.

<sup>16</sup> Data diolah dari *Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPD, DPRD, DPRD Prop. DPRD Kab dan Kota*, (Yogyakarta: PPS Desa Panggun Harjo Kabupaten Bantul, 2009).

<sup>17</sup> Wawancara dengan KH. Zainal Abidin Munawwir, 7 Oktober 2010.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Hunain, kepala Dusun Krapyak Kulon, 7 Oktober 2010.

<sup>19</sup> Lihat penelitian lain oleh Patoni, *Peran Kiai*.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Dr. Zuli Qodir, alumnus Pesantren Al-Munawwir, 20 Oktober 2010.

<sup>21</sup> Calon presiden-wakil presiden pada Pemilu 2004 adalah (1) Wiranto-Solahuddin Wahid, (2) Megawati Sukarnoputri-Hasyim Muzadi, (3) Amien Rais-Siswono Yudhohusodo, (4) Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, dan (5) Hamzah Haz-Agum Gumelar.

<sup>22</sup> Syamsuddin, “Usaha Pencarian”, hlm. 9.

<sup>23</sup> Wawancara dengan KH. Zainal Abidin Munawwir, 6 Desember 2010.

<sup>24</sup> Miftahul Akhyar, “Kiai NU Tidak Akan Tinggalkan Politik”, [http://www.republika.co.id/berita/66656/Kiai\\_NU\\_tidak\\_akan\\_Tinggalkan\\_Politik](http://www.republika.co.id/berita/66656/Kiai_NU_tidak_akan_Tinggalkan_Politik), diakses pada 2 Desember 2010.

<sup>25</sup> Patoni, *Peran Kiai*, hlm. 162.

<sup>26</sup> Irwan Abdullah, ddk., *Agama, Pendidikan Islam dan Tanggung Jawab Sosial Pesantren*, (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM dan Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 3.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Solahuddin, pengajar dan pengelola Pesantren

Al-Munawwir, 23 November 2009.

<sup>28</sup> Khoirudin, *Politik Kiai*, hlm. 144.

<sup>29</sup> Staniland, "What is Political", hlm. 9.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Solahudin, pengajar dan pengelola Pesantren Al-Munawwir, 20 Oktober 2010.

<sup>31</sup> Patoni, *Peran Kiai*.

<sup>32</sup> Bolland, *The Struggle of Islam*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, ddk., *Agama, Pendidikan Islam dan Tanggung Jawab Sosial Pesantren*, (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM dan Pustaka Pelajar, 2008).
- Anonim, *Rencana Pembangunan Pemukiman (RPP) Desa Panggungharjo 2009-2014 Kec. Sewon Bantul Yogyakarta*, (2009).
- Anonim, *Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPD, DPR, DPRD Prop. DPRD Kab dan Kota*, (Yogyakarta: PPS Desa Panggungharjo Kabupaten Bantul, 2009).
- Anonim, *Sejarah dan Perkembangan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta*, (Yogyakarta: Pengurus Pusat Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, Cet. II 2001).
- Bolland, BJ., *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1982).
- Deliarnov, *Ekonomi Politik*, (Jakarta: Erlangga, 2003).
- Departemen Agama RI., *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah: Pertumbuhan dan Perkembangannya*, (Jakarta: Ditjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI., 2003).
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3S, 1990).
- Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara*, (Jakarta: Paramadina, 1996).
- Geertz, Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1989).
- Horikoshi, Hiroko, *Kiai dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: LP3S, 1987).
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyarah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Graya Media Pratama, 2001).
- Khoirudin, *Politik Kiai*, (Yogyakarta: Averroes Press, 2005).
- Marsh, David, dan Gerry Stocker (eds.), *Theory and Methods in Political Science*, (New York: Palgrave, 2002).
- Patoni, Ahmad, *Peran Kiai Pesantren dalam Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Patria, Nezar, dan Andi Arif, *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- Staniland, Martin, "What is Political Economy?: A Study of Social Theory and Underdevelopment", dalam Deliarnov, *Ekonomi Politik*, (Jakarta: Erlangga, 2003).
- Steenbrink, Karel A., *Pesantren, Madrasah, Sekolah*, (Jakarta: LP3ES, 1994).

- Surbakti, Ramlan, *Perbandingan Sistem Politik*, (Surabaya: Mecphiso Grafika, 1984).
- Syamsuddin, Dien, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Pemikiran Politik Islam", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an* No. 2, Vol. IV, 1993.
- Turmudi, Endang, *Kiai dan Perselingkuhan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKiS, 2004).